

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abineno, J.L. Ch. *Perkawinan dan Perceraian Menurut Pandangan Iman Kristen*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2006.
- Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Asmin. *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974*. Jakarta: Dian Rakyat, 1986.
- Badriyah, Siti, S. M. *Penemuan Hukum dalam Konteks Pencarian Keadilan*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010.
- Cenggana, Anly. *Hak Asasi Beragama dan Perkawinan Khonghucu: Perspektif Sosial, Legal, dan Teologi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 1998.
- Dhammananda, K. Sri. *Keyakinan Umat Buddha*. Kuala Lumpur: Ehipassiko Foundation, 2003.
- Djoko, Zulfa Basuki. *Bungai Rampai Kewarganegaraan Dalam Persoalan Perkawinan Campuran*. Jakarta: Badan Penerbit FH UI, 2007.
- Hamzah, Andi. *Asas-asas Hukum Pidana*. Bandung: Rineka Cipta, 2008.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Harahap, M. Yahya. *Kekuasaan Mahkamah Agung: Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Kelsen, Hans. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, terjemahan Raisul Muttaqien. Bandung: Nusa Media, 2011.
- Khairiah. *Agama Budha*, Cetakan 1. Yogyakarta: Kalimedia, 2018.
- Konferensi Waligereja Indonesia (KWI). *Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonici) Edisi Resmi Bahasa Indonesia*. Jakarta: KWI, 2006.
- Lubis, M. Solly. *Pergeseran Garis Politik dan Perundang-Undangan mengenai Pemerintah Daerah*. Bandung: Alumni.

Manan, Bagir, dan Kuntanan Magnar. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*. Bandung: PT. Alumni, 2017.

Manan, Bagir. *Kekuasaan Kehakiman Indonesia: Dalam Realitas dan Harapan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2017.

Manan, Bagir. *Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) dalam Hukum dan Perundang-Undangan Utama*. Jakarta: FH UI Press, 2014.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2019.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

Ridwan H.R. *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.

Ridwan. *Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah*. Yogyakarta: FH UII Press, 2014.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Soeprapto, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.

Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Titib, I Wayan. *Teologi & Simbol-Simbol dalam Agama Hindu*. Surabaya: Paramita, 2001.

Jurnal

Adonara, Firman Floranta. "Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi". *Jurnal Konstitusi* 12, No. 2 (Juni 2015): 221.<https://doi.org/10.31078/jk1222>.

Afda'u, Faisal, Prasetyo, B., dan Saryana, S. "Membedah Pengaturan dan Sanksi Pernikahan Beda Agama Dalam Hukum Indonesia". *Binamulia Hukum* 13, No. 2 (Desember 2024): 393-406. <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.946>.

Ananda, Deva Tri, Hakim, L., dan Ansori, A. "Dampak Hukum dari Akibat Putusnya Perkawinan Pasangan Berbeda Agama Terhadap Harta Bersama dan Hak Asuh Anak". *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 8, No. 2 (2023):

316-331, <https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2547>.

Bedner, Adriaan dan Stijn van Huis. "Plurality of marriage law and marriage registration for Muslims in Indonesia: a plea for pragmatism". *Utrecht Law Review* 6, No. 2 (Juni 2010): 175-191, <https://utrechtlawreview.org/articles/10.18352/ulr.130>.

Halilah, Siti, dan Mhd. Fakhurrahman Arif. "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli". *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, No. 2 (Desember 2021): 58. <https://ejournal.annadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/334/275>

Hulu, Rizki, Okmen Faebudodo, dan Bayu Widianto. "Legalitas Perkawinan Beda Agama Dan Akibat Hukumnya Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum* 4, No. 01 (Januari 2026): 3227. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3629>.

Hutapea, Manna Hasiholan Paris. "Analisis Keabsahan Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Penetapan Pengadilan Atas Perkawinan Beda Agama Setelah Lahirnya Sema Nomor 2 Tahun 2023 (Analisis Putusan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Utr)". *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, No. 6 (Desember 2024): 4-5, <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/672>.

Karimah, Adhiyani lu'luul, dan Muhamad Doni Tabroni. "Kekuatan Mengikat SEMA No. 2 Tahun 2023 Dalam Sistem Peradilan Indonesia: Antara Kepastian Hukum Perkawinan Beda Agama Dan Independensi Hakim". *At-Tasyrih Jurnal Pendidikan dan Hukum Islam* 12, No. 1 (Maret 2026): 247. <https://doi.org/10.55849/attasyrih.v12i1.504>.

Kurniawan, M Beni, Dinora Refiasari, dan Sri Ayu Ramadhani. "Disparitas Putusan Pengadilan Terkait Legalisasi Nikah Beda Agama". *Jurnal Yudisial* 16, No. 3 (Desember 2023): 343, <https://doi.org/10.29123/jy.v16i3.660>.

Masyayih, Ali Akbar, dan Moh. Wahyu Al Waris. "Legal Standing Peraturan Sema No. 2 Tahun 2023 Dalam Polemik Aturan Kawin Beda Agama". *Constitutional Journal* 3, No. 1 (Juni 2024): 66, <https://doi.org/10.35719/constitution.v3i1.91>.

Muwahid, "Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif", *Jurnal Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 7, No. 1 (Juni, 2017): 225, <https://doi.org/10.15642/al-hukama.2017>.

Putra, Hendra Catur, “Kedudukan SEMA Dalam Sistem Hierarki Perundang-Undangan Di Indonesia”, *ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan* 1, No. 2, <https://doi.org/10.19109/elqonun.v1i2.21727>.

Santoso, Raihan Andika, Elan Jaelani, dan Utang Rosidin, “Kedudukan dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Dalam Hukum Positif Indonesia”, *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 1, No. 4. <https://doi.org/10.59581/deposisi.v1i4.1392>.

Seneru, Witisna, Edi Sumarwan, dan Virna Dita Pratiwi, “Pernikahan Beda Agama Dalam Pandangan Agama Budha”, *Jurnal Penelitian Agama* 24, No. 2 November 2023.

Skripsi

Fahreze, Ergi Ahmad. “Disparitas Putusan Hakim Mengenai Implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Terhadap Besaran Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Depok Perspektif Efektif Hukum”. Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2024.

Ningrum, Fara Puspita Aqila. “Efektifitas Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 Terhadap Pelaksana Perkawinan Beda Agama Dalam Bingkai Kebhinekaan Indonesia”. Skripsi Sarjana Universitas Lampung, Lampung, 2026.

Sumber dari Internet

Pasha, Karisna Mega, “Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”, *Hukumonline.com*, diakses pada 19 April 2026, https://www.hukumonline.com/klinik/a/hierarki-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia-cl4012/#_ftn3.

Zaman, Nuruz, “Mengenal Peraturan Kebijakan dan Kedudukannya”, *Hukumonline.com*, diakses pada 19 April 2026, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-peraturan-kebijakan-dan-kedudukannya-lt65b0fb2e6e0f9/>.

Purba, Devin Ignatius, “Peraturan Kebijakan Sebagai Law Of The Game: Menakar Kekuatan Mengikat Surat Edaran Dalam Sistem Hukum Indonesia”, *lk2fhui.law.ac.id*, diakses pada 19 April 2026, <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/lexpress-peraturan-kebijakan-sebagai-law-of-the-game-menakar-kekuatan-mengikat-surat-edaran-dalam-sistem-hukum-indonesia/#:~:text=Hadjon%20menjelaskan%20bahwa%20surat%20edaran,bebas%20atau%20diskresi%20dari%20Pemerintah.>

Suharto, H, dan Ahmad Maulana Sabbaha, “Kemerdekaan Hakim dalam Menjaga

Integritas di Era Masifnya Media Sosial”, *pta-papuabarat.go.id*, diakses pada 20 April 2026, <https://pta-papuabarat.go.id/wp-content/uploads/2025/09/Kemerdekaan-Hakim.pdf>.

Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area, “Perkawinan Beda Agama”, *mh.uma.ac.id*, diakses pada 22 April 2026, <https://mh.uma.ac.id/perkawinan-beda-agama/>.

Hanifah, Septiani Arum, “Mengenal SEMA dan Kedudukannya dalam Hukum”, *Hukum.id*, <https://www.hukumku.id/post/apa-itu-sema>.

Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), *Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonici) Edisi Resmi Bahasa Indonesia* (Jakarta: KWI, 2006).

Imankatolik, “Kitab Hukum Kanonik”, diakses pada 19 April 2026, <https://www.imankatolik.or.id/khk.php?q=1055-1071>.

Humas MKRI, “Kendala Akses Pencatatan Sipil Bagi Pasangan dan Anak yang Lahir dari Nikah Beda Agama”, *mkri.id*, <https://www.mkri.id/berita/kendala-akses-pencatatan-sipil-bagi-pasangan-dan-anak-yang-lahir-dari-nikah-beda-agama-24434>.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk

Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 2 dan 3.

Putusan

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1400 K/Pdt/1986.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 24/PUU-XX/2022.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst.

Penetapan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Kbm.